

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KEPENGHULUAN TANJUNG LEBAN KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR



OLEH:

EDI GURNAWAN
NIM : 10775000328

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU 2011**

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KEPENGHULUAN TANJUNG LEBAN KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR

**OLEH
EDI GURNAWAN
NIM. 10775000328**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Pembangunan adalah proses mengubah masyarakat di negara-negara berkembang secara terencana, transformatif (menjadi lebih baik), sesuai dengan program-program yang sudah ditentukan secara politik oleh para pengambil kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui dan menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan metode pengumpulan data kuisisioner, wawancara, dan observasi. Teknis analisa data yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan analisa dan pengamatan secara langsung terjun kemasyarakat. Hasil penelitian diatas menunjukkan kurang berpengaruhnya faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Karena masyarakat sibuk bekerja untuk mencari kehidupan sehari-hari dan juga masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban beranggapan pembangunan adalah tugas pemerintahan daerah kabupaten. Sehingga mereka merasa dimanjakan oleh pembangunan yang sudah ada. Hal ini berakibat lemahnya masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Penelitian ini menyarankan agar aparatatur pemerintahan Kepenghuluan Tanjung Leban membantu masyarakat yang masih dibawah standar ekonominya yang masih minim, agar mereka selalu ingin berpartisipasi untuk selanjutnya. Dan juga pemerintahan desa Kepenghuluan Tanjung Leban agar menyimpan dokumen yang bersangkutan dengan perkembangan pembangunan desa supaya yang meneliti selanjutnya bisa mengambil data penelitian dengan lengkap. Pemerintahan Kepenghuluan Tanjung Leban hendaknya memberikan pengarahannya tentang perlunya pembangunan dan melestarikan pembangunan yang sudah ada menjadi milik bersama.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
LEMBAR PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1. Pengertian Partisipasi	14
2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi	17
2.3. Bentuk dan Tipe Partisipasi Masyarakat	20
2.4. Masyarakat	22
2.5. Pembangunan	24
2.6. Hubungan Partisipasi dengan Pembangunan	27
2.7. Konsep Otonomi Daerah	30
2.8. Otonomi Desa	35
2.9. Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan	37
2.10. Defenisi Konsep	40
2.11. Defenisi Operasional	42
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Bentuk Penelitian	43
3.2. Lokasi Waktu Penelitian	43
3.3. Populasi dan Sample	43
3.4. Jenis Data dan Sumber Data	45
3.5. Teknik Pengumpulan Data	46
3.6. Analisa Data	46
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Luas dan Batas Wilayah	47
4.2. Penduduk	47
4.3. Penduduk Menurut Usia	49
4.4. Mata Pencarian	50
4.5. Pendidikan	51
4.6. Pemerintahan	53
4.7. Kesehatan	53
4.8. Agama	58

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Identitas Responden Penelitian.....	56
5.2. Analisis Partisipasi.....	59
5.3. Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	59
5.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	66
5.5. Upaya-upaya Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	83

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	86
6.2. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu yang menjadi masalah besar yang sering menjadi persoalan dalam masyarakat adalah kecenderungan individu-individu dalam masyarakat mengabaikan hak yang dimiliki untuk sebuah kepentingan umum yang lebih tinggi. Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama. Adanya kesadaran yang rendah terhadap pentingnya menggunakan hak yang dimiliki mencerminkan ketidak pedulian individu-individu dalam masyarakat terhadap kehidupan masa depan seperti pembangunan desa.

Pembangunan adalah upaya meningkatkan derajat kehidupan secara berkelanjutan untuk mampu menentukan nasib ditangannya sendiri, yaitu mencerdaskan manusia dan melepaskan mereka dari ketergantungan pada manusia lain. Pembangunan prasarana dan sarana dilakukan untuk menunjang kegiatan manusia dalam pembangunan.

Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan. Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti pertama sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan; kedua sebagai program dan ketiga sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh

kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik (Setyono, 2002:34). Berdasarkan catatan statistik diketahui bahwa hampir 80% penduduk di Indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan asset pembangunan, apabila dikembangkan dan diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat merupakan konsekuensi dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi yang berdasarkan pada pancasila. Disamping itu juga diharapkan agar proses pembangunan Desa dapat berjalan dengan lancar dan dapat menciptakan suatu legitimasi bagi sistem pembangunan desa yang efektif.

Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat, bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal:

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut.
3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut.

4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidakikutsertakan.

Partisipasi merupakan konsultasi dengan masyarakat atau kelompok lain yang terkena oleh keputusan-keputusan dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dapat menyebabkan pembangunan yang nantinya kurang berjalan dengan baik. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nagari diharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai masalah pembangunan nagari yang dihadapi dengan alternatif pemecahan yang secara utuh dilaksanakan oleh masyarakat.

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa tanpa harus didikte oleh kepentingan pemerintah daerah dan pusat. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin

pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi 'kosmetik' untuk sekedar memenuhi 'quota' adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 sebenarnya telah dibuka ruang terkait pelebagaan partisipasi masyarakat desa tersebut melalui pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Seperti yang dilihat pada Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 08 Tahun 2009 pada bab 2 pasal 2 tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan yaitu, pembangunan kawasan kepenghuluan bertujuan untuk menata ruang disebuah kepenghuluan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa public dan social serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar.

Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 08 Tahun 2009 pada Pasal 5 tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan yang dimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan kepenghuluan meliputi:

- a. Memberikan informasi tentang potensi kepenghuluan serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan tata ruang;
- b. Memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
- c. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang;
- d. Memanfaatkan hasil pembangunan kawasan kepenghuluan;
- e. Memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan kepenghuluan.

Dalam perencanaan pembangunan Kepenghuluan dapat kita lihat pada pasal 3 Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 08 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan bahwa, pelaksanaan Pembangunan serta pemanfaat dan pendayagunaan kawasan kepenghuluan mengikutsertakan pemerintahan kepenghuluan dan lembaga kemasyarakatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan kepenghuluan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu meliputi aspek social, dan ekonomi kawasan kepenghuluan, penguatan kapasitas pemerintahan

kepenghuluan dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan manajemen system kawasan kepenghuluan.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultif dan koordinatif.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 pada pasal 3 tugas lembaga kemasyarakatan meliputi:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dari rumusan diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi itu dominan bahkan tidak dapat dipisahkan dalam segala kehidupan masyarakat ataupun kelompok masyarakat, yang mana partisipasi masyarakat merupakan suatu elemen proses pembangunan oleh karena itu partisipasi masyarakat perlu dibangkitkan, tanpa adanya partisipasi masyarakat otomatis pembangunan tidak akan terlaksana.

Pada proses pembangunan desa agar berjalan dengan lancar harus ada partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspek kegiatan pembangunan desa sangat dibutuhkan. Pembangunan desa tidak akan dapat

berjalan secara maksimal, bila mana pemerintah desa (kepala desa) sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakat desa, sehingga yang terjadi adalah kefakuman.

Adapun jumlah masyarakat yang ada di Kepenghuluan Tanjung Leban dapat dilihat jumlahnya pada tabel 1.1 berikut ini:

Table 1.1 Jumlah Penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Dusun Tanjung Leban	210 KK	450
2	Dusun Rantau Benuang	350 KK	750
3	Dusun Parit Ma'ali	110 KK	233
Jumlah		670 KK	1433

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban, Tahun 2010

Dari table 1.1 diatas jumlah keseluruhan penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban yaitu 1433 orang dengan 670 KK. Semakin banyak masyarakat disuatu desa seharusnya dapat menunjang kemajuan pembangunan desa. Seperti yang diterangkan oleh latar belakang diatas, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi semakin bagus kemajuan pembangunan disuatu desa tersebut.

Selanjutnya pengamatan penulis di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir terlihat beberapa gejala yang mendukung untuk diadakannya suatu penelitian yaitu:

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan gotong royong.
Gotong royong merupakan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat baik dari segi pemeliharaan pembangunan yang sudah ada maupun membangun yang baru. Adapun jadwal kegiatan gotong royong setelah penulis lakukan wawancara pada kepala desa dilaksanakan dua minggu sekali setiap hari minggu.

Tabel 1.2 Jumlah Kehadiran Masyarakat pada Pelaksanaan Gotong Royong Pembangunan Desa Tahun 2010

No	Jenis Pembangunan	Pelaksanaan Gotong Royong		
		Undangan (Orang)	Kehadiran (Orang)	Persentase (%)
1	Mesjid dan Musholla	130	55	42,30%
2	MDA dan SMP Yayasan	150	53	35,33%
3	Sarana Olah Raga	115	61	53,04%
Jumlah		395	169	42,78%

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban, Tahun 2010

Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa jumlah kehadiran masyarakat pada pelaksanaan goyong royong yang paling banyak ikut dalam Pembangunan sarana olah raga. Masyarakat diundang berjumlah 115 dan masyarakat yang hadir 61 orang atau (53,04%), kemudian masyarakat yang hadir mengikuti gotong royong dalam pembangunan MDA dan SMP Yayasan yaitu 150 orang masyarakat yang diundang dan masyarakat hadir 53 orang atau (35,33%). Dari jumlah masyarakat yang di undang 395 orang yang hadir hanya 169 orang atau (42,78%).

2. Kurangnya keterlibatan masayarakat dalam menghadiri rapat, walaupun undangan rapat disebarkan 2 hari sebelum waktu rapat diadakan. Adapun jumlah kehadiran masyarakat dalam mengikuti rapat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Jumlah Kehadiran Masyarakat pada Pelaksanaan Rapat Pembangunan Desa Tahun 2010

No	Jenis Pembangunan	Pelaksanaan Rapat		
		Undangan (Orang)	Kehadiran (Orang)	Persentase (%)
1	Mesjid dan Musholla	130	50	38,46%
2	MDA dan SMP Yayasan	150	60	40%
3	Sarana Olah Raga	115	30	26,08%
Jumlah		395	140	35,44%

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban, Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah masyarakat yang di undang dalam rapat pembangunan mesjid dan musholla 130 orang yang hadir 50 orang

atau (38,46%), kemudian masyarakat yang di undang dalam rapat pembangunan MDA dan SMP yayasan berjumlah 150 orang yang datang 60 orang atau (40%), dan masyarakat di undang dalam kegiatan rapat pembangunan sarana olah raga berjumlah 115 orang dan yang hadir 30 orang (26,08%).

3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan uang untuk pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban. Hal ini terlihat dari data observasi pada pembangunan mesjid-mesjid dan yayasan di Kepenghuluan Tanjung Leban karena tidak ada dana yang mendukung berjalan pembangunan. Data ini didukung oleh hasil wawancara pada Bapak Agus yang selaku menjadi Sekdes menyatakan (wawancara, Januari 2011).
 “Masih banyak masyarakat yang kurang memberikan sumbangan dalam bentuk uang, karena masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban masih sibuk dalam membuka lahan pertanian kelapa sawit sehingga uang mereka banyak digunakan untuk kepentingan kehidupan sehari-hari”.

Adapun jumlah bantuan pembangunan pemerintah dan swadaya masyarakat yaitu:

Tabel 1.4 Jenis Pembangunan Desa dengan Menggunakan Bantuan dari Pemerintahan dan Swadaya Masyarakat

No	Jenis Pembangunan	Total Biaya	Sumber Pembiayaan (Jutaan Rupiah)	
			Pemerintah	Swadaya Masyarakat
1	Mesjid dan Musholla	540,000,000	470,000,000	11,000,000
2	MDA dan SMP Yayasan	160,000,000	90,000,000	55,000,000
3	Sarana Olah Raga	35,000,000	17,000,000	9,000,000
4	Kantor Desa	110,000,000	82,000,000	6,000,000
Jumlah		845,000,000	609,000,000	81,000,000

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban, Tahun 2010

Dari tabel diatas jumlah pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban yaitu mesjid dan musholla, MDA dan Yayasan, sarana olah raga, kemudian kantor desa. Dari semua bangunan tersebut jumlah dana yang digunakan 845,000,000, dana yang dibantu oleh pemerintahan daerah sebanyak 609,000,000, kemudian swadaya masyarakatnya 81,000,000.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***"Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir"***.

1.2 Rumusan Masalah

Beritik tolak dari pemaparan dan kenyataan diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dalam memberikan Partisipasi Pembangunan yang lebih berkala prioritas serta
2. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan yang sama.
3. Sebagai tambahan penulis dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama kuliah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari skripsi ini antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah dan pokok-pokok bahasan, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pengertian Partisipasi masyarakat, pengertian pembangunan desa, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang identifikasi variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis instrumen serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan di lakukan penelitian. Seperti, lokasi penelitian, karakteristik, dan kategori.

BAB V : ANALISA DATA

Bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluhan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi sebenarnya adalah merupakan istilah dalam bidang manajemen, namun saat ini telah lebih berkembang luas jadi bukan monopoli ilmu manajemen saja, dalam artian istilah partisipasi itu sudah umum dan dalam arti yang luas, istilah ini sebenarnya diambil dari bahasa asing *participation*, yang artinya mengikutsertakan pihak lain. Partisipasi dapat juga diartikan sebagai keikutsertaan, peranserta tau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya.

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat seringkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat sulit diajak maju oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga disebabkan karena sudah adanya campur tangan dari pihak penguasa.

Lijan Poltak Sinambela (2006: 37), pemahaman konsep partisipasi dalam banyak hal sering diartikan secara sederhana sebagai peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu proses

perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari penjelasan pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari

seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

Pengertian Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh sendirinya. (Taliziduhu Ndraha, 2000: 18).

2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell dalam Ross (<http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>), mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat

yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat;
2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
6. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggangannya oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
9. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

2.3 Bentuk dan Tipe Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi

sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh

partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

2.4 Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu musyarak yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, menurut Ralf Linton (dalam Abdul Syani, 2002: 31) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasi dirinya dengan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan social dengan batas-batas tertentu. Sedangkan ciri-ciri masyarakat yang hidup bersama adalah sebagai berikut:

1. Bercampur untuk waktu lama.
2. Mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan.
3. Mereka merupakan satu sistem hidup bersama.

Dalam kehidupan bermasyarakat antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, karena antara satu dengan yang lain saling ketergantungan. Seperti kita ketahui bersama bahwa manusia tidak biasa hidup tanpa orang lain, kita selalu memerlukan orang lain, karena kita tahu bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan.

Menurut Harold J. Laski (dalam Budiarjo, 2004: 34), masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan bersama, yang mana mereka hidup disatu wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka dan harus ditaati oleh setiap orang, sehingga mereka hidup dalam keadaan terjaga keamanannya. Dari apa yang dikemukakan oleh Harold J. Laski dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan manusia perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia, agar terjaga dan terpelihara dari ancaman-ancaman yang merusak kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya aturan (hukum), manusia akan merasa takut untuk mengganggu dan berbuat jahat kepada orang lain.

Harold Lasswell (dalam Budiarjo, 2004), mengamati kehidupan masyarakat disekelilingnya, yaitu masyarakat barat ia memperinci delapan nilai yang diinginkan yaitu:

1. Kekuasaan
2. Pendidikan/penerangan
3. Kekayaan
4. Kesehatan
5. Keterampilan
6. Kasih sayang
7. Kejujuran
8. Kesegaran

Marian Budiarjo (2000: 32), dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang dilayani itu maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus. Dalam kehidupan masyarakat dan dalam hubungannya dengan orang lain, pada dasarnya setiap manusia pasti menginginkan nilai-nilai diatas, karena nilai-nilai diatas merupakan suatu kebutuhan yang ingin di wujudkan dan menjadi impian bagi setiap orang.

2.5 Pembangunan

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Menurut Sondang P. Siagian (2001: 4) pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Selanjutnya menurut Sufian Hamid (2003: 56) pembangunan adalah suatu kegiatan atau usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah dari suatu kondisi yang lebih baik.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Menurut suara terbanyak atau jawaban terbaik bahwa Pembangunan adalah proses mengubah masyarakat di negara-negara berkembang secara terencana, transformatif (menjadi lebih baik), sesuai dengan program-program yang sudah ditentukan secara politik oleh para pengambil kebijakan.

Dalam praktiknya, karena kebijakan ini bersifat politik, maka pembangunan lekat dengan ideologi tertentu, dalam hal ini adalah kapitalisme, yang relatif liberal dan menganut ekonomi pasar. Menurut kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata "bangun" yang artinya bangkit, sedangkan pembangunan diartikan sebagai proses, pembuatan, atau berdiri. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi:

1. Ia berarti memberikan perhatian terhadap "kapasitas" terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.

2. Ia mencakup keadilan (equity) perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mempengaruhi kapasitasnya.
3. Penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.

Sondang P. Siagian (2001: 4) mengatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencakup:

1. Pembangunan dibidang politik
2. Pembangunan dibidang ekonomi
3. Pembangunan dibidang sosial budaya
4. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Dari uraian diatas bahwa pembangunan itu sangat penting, karena dengan adanya pembangunan akan memudahkan pertumbuhan bagi negara Republik Indonesia baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik.

2.6 Hubungan Partisipasi dengan Pembangunan

Pembangunan yang menyangkut pengertian bahwa manusia adalah objek dan subjek pembangunan. Karena manusia sebagai subjek pembangunan maka dia harus diperhitungkan. Oleh karena itu perlu mengajak subjek tadi berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Sering kita mendengar bahwa pembangunan yang tidak dilaksanakan tidal mendapat sambutan rakyat, hal ini meminta pemimpin memiliki persepsi yang tajam dalam mendeteksi keinginan masyarakat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Mengapa perlu partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pembangunan?, karena dalam pembangunan adalah usaha rakyat masyarakat sebanyak mungkin ikut serta dalam pemerintah, memberi bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin keberhasilan pembangunan. Mengapa pemerintah perlu menghimbau masyarakat?, karena keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi unsure masyarakat dapat bercorak pasif (memang tidak menolak program pembangunan, hanya tidak ada prakarsa) atau corak

aktif (artinya menerima) malahan aktif mengajak orang lain memperluas jangkauan (pemerataan) dan meningkatkan hasil pembangunan.

Partisipasi aktif dalam masyarakat mengambil bentuk aksi social bukan tindakan sporadic. Oleh karena itu selalu diusahakan derajat kelanggengan atau perbandingan menetap agar aksi social dapat bergerak luas dan cukup lama. Aksi social demikian menjadi gerakan social dan gerakan social ini akan banyak melibatkan orang. Lebih luasnya pengorganisasian jaringan komunikasi yang teratur. Dalam gerakan social unsure kesukarelaan merupakan hal penting dimana jika sudut pembicaraannya partisipasi berarti meneliti unsure sifat, tujuan dan cara, sesungguhnya pula pembicara tentang konsepsi partisipasi masyarakat. Perbedaan dalam identifikasi unsure, sifat dan cara tujuan partisipasi menandakan adanya perbedaan dalam melaksanakan partisipasi. Dalam menggerakkan partisipasi perlu lama. Dimasa penjajahan upaya masyarakat untuk membangun bangsa tumbuh secara swadaya melalui berbagai bentuk mulai dari pendidikan Budi Utama sampai pada bentuk Barisan Tentara Rakyat. Dalam masa Repelita 1 sampai saat sekarang masyarakat mengalami perkembangan meskipun ada stimulasi pemerintah dan ikut sertanya pihak swasta yang saling keterpaduan dan banyak berkaitan dengan kesatuan gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Keterpaduan ini akhirnya dapat meningkatkan efesien dan efektifitas pembangunan dalam rangka mengurangi kemiskinan, kebodohan, meningkatkan pemerataan dan kestabilan dalam masyarakat.

Sebenarnya lembaga swadaya memiliki potensi besar dalam melaksanakan dan meningkatkan bangunan yaitu: pertama, berdasarkan pengetahuan atas masyarakatnya mereka dapat memberikan masukan yang tepat bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan baik berupa bangunan prasarana, pelayanan serta peningkatan ekonomi untuk mengembangkan usaha masyarakat kecil sesuai dengan tingkat aspirasi masyarakat. Kedua, berdasarkan hubungan kedekatannya dengan masyarakat tentu dapat pula membantu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan menjadi lebih tinggi. Ketiga, berdasarkan kedudukan pula lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi komunikator dan fasilitator yang efektif menghubungkan keinginan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sehingga gerak pembangunan dari ketiga peran tersebut lebih serasi.

Akhirnya upaya untuk meningkatkan pembangunan masyarakat membutuhkan peran serta seluruh komponen yang dianggap mampu menggerakkan dan menumbuh kembangkan pembangunan yang berbasis partisipatif dengan kesesuaian kesepakatan dalam makna dan tujuannya. Peran serta masyarakat dan menempatkan kedudukan sebagai subjek pembangunan yang amat penting, hal ini erat kaitannya dengan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk memilih peranannya dalam pembangunannya terutama dalam kaitan kelestarian dan pengelolaan manfaat pembangunan yang berkelanjutan (Hacruman JS, 1995: 90-95). Yang merupakan kesimpulan-kesimpulan para ahli ekonomi antara kedua variable itu (pemerintah dan

masyarakat) adalah apa yang dikemukakan oleh Adelman dan Moris: “angka-angka laju industrialisasi yang lebih tinggi. Kenaikan-kenaikan yang lebih cepat dalam produktivitas pertanian. Dan angka-angka laju ekonomi cenderung untuk serta relative merugikan kaum miskin: pihak yang memperoleh bagian terbesar dari sebuah hasil pembangunan ekonomi adalah selalu kelas menengah dan kelompok-kelompok yang berpenghasilan lebih tinggi”, hubungan antara pembangunan ekonomi dan demokrasi juga telah mempertanyakan serangkaian perbandingan statis dan studi pembangunan yang panjang lebar. Pada umumnya studi-studi itu memindahkan tekanan penjelasan dari keadaan yang melimpahkan kepada pemerataan ekonomi dan urutan-urutan pembangunan (Hantinton, 1990: 29).

2.7 Konsep Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Selain itu, amanat UUD 1945 yang telah di amandemen menyebutkan bahwa, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis" 120 direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jadi dapat dipahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia jelas telah diatur dalam landasan Konstitusional, yang semuanya dapat dilihat dalam UUD dan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku di Indonesia. Dan dapat di kaji dalam Landasan Konstitusi tersebut bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia tidak dapat terlepas dari asas desentralisasi yang di wujudkan dalam otonomi daerah, sebagai bentuk jaminan terwujudnya kekuasaan yang demokratis yang mampu mengakomodasi aspirasi rakyat.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama

antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada aparat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/ atau pemerintahan desa. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan Negara secara keseluruhan.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Desa dengan nama lain dikabupaten Rokan Hilir juga disebut dengan nama Kepenghuluan. Kemudian kepenghuluan ini di atur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2009 tentang Kepenghuluan

2.8 Otonomi Desa

Pemberdayaan desa dalam kerangka otonomi desa merupakan persoalan yang tiada henti menjadi polemik di berbagai kalangan pemerhati, baik dari dunia birokrasi, perguruan tinggi, partai politik maupun lembaga non-pemerintah. Polemik mengenai hal ini menjadi semakin terlihat setelah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya memberikan porsi otonomi kepada kabupaten/kota saja dan memposisikan desa hanya sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan-urusan publik yang harus diselesaikan oleh kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pun belum memberikan ruang yang cukup bagi desa untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri, karena hanya urusan-urusan publik yang bersifat mekanis saja yang diberikan kepada masyarakat desa.

Ini terlihat dari pasal 7 peraturan pemerintah ini yang hanya memberikan 4 (empat) macam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, yakni:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Kalau dilihat dari PP No 72 Tahun 2005 bab 6 Pasal 63 tentang perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota
2. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Dilihat dari PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa dan walaupun pemerintahan yang membentuk peraturan namun hal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk kemajuan pembangunan Desa. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Desa dengan nama lain di kabupaten Rokan Hilir juga disebut dengan nama Kepenghuluan. Kemudian kepenghuluan ini di atur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2009 tentang Kepenghuluan yang menegaskan dalam bab 2 yaitu:

Pasal 2

“Pembangunan kawasan kepenghuluan bertujuan untuk menata ruang disebuah kepenghuluan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar”.

Pasal 4

1. Pembangunan kawasan kepenghuluan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dan atau pihak ketiga mengikut sertakan

pemerintahan kepenghuluan, BPK dan lembaga kemasyarakatan sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Pasal 5

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan kepenghuluan meliputi:
 - a. Memberikan informasi tentang potensi kepenghuluan serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan tata ruang;
 - b. Memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
 - c. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang;
 - d. Memanfaatkan hasil pembangunan kawasan kepenghuluan;
 - e. Memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan kepenghuluan.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang pembangunan kawasan kepenghuluan sebagai maksud dalam pasal 4 dan bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 diatur dalam Peraturan Bupati.

2.9 Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan

Menurut Soerjono Soekanto (1990: 268) peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan social. Maksudnya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti kepala desa yang

merupakan pemerintah desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Sedangkan menurut Veitzal Rivai (2004: 148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peranan pemerintah desa dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya sebagai pemerintah desa.

Fungsi pemerintah desa merupakan gejala social, karena harus diwujudkan dalam interaksi antara individu di dalam situasi social suatu kelompok masyarakat (Veitzal Rivai, 2004: 53). Secara operasional fungsi pemerintah desa dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Instruksi

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Fungsi partisipatif

Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan tararah berupa kerja

sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

3. Fungsi delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. (Tauziduha Ndaraha, 2000: 18).

Usaha-usaha tersebut adalah seperti dibawah ini yaitu:

- a. Proyek pembangunan desa dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
- b. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.
- c. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- d. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat haruslah diberikan informasi tentang arti penting pembangunan melalui kegiatan komunikasi, adaptasi, kerja sama

sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat dimengerti memahami dan pada hakekatnya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

2.10 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun defenisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini adalah:

1. Partisipasi dapat juga diartikan sebagai keikutsertaan, peran serta tau keterlibatan yang berkitan dengan keadaan lahiriahnya.
2. Prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran.
3. Masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu musyarak yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
4. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

5. Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Usia

Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. Jadi perempuan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

c. Pendidikan

Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

e. Lamanya tinggal

Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2.11 Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan suatu cara untuk mengukur variabel-variabel (Masri Siangarimbun, 2006: 46), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui, indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Adapun yang jadi variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Usia
- b. Jenis kelamin
- c. Pendidikan
- d. Pekerjaan dan penghasilan
- e. Lamanya tinggal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

3.2 Lokasi Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Waktu penelitian ini dilakukan setelah melaksanakan seminar proposal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai bulan Maret 2011.

3.3 Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Rosady Ruslan, 2003: 135). Adapun populasi dalam penelitian ini masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban yang terdiri dari 1433 orang, yang semuanya termasuk Kepala Desa,

Tokoh-tokoh Adat, Perangkat Desa, dan Masyarakat Dusun. Lihat semua jumlah populasi dalam table 3.1 dibawah ini yaitu:

Tabel 3.1 Jumlah Populasi dan Sampel Berdasarkan KK di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Dusun Tanjung Leban	450	210 KK
2	Dusun Rantau Benuang	750	350 KK
3	Dusun Parit Ma'ali	233	110 KK
	Jumlah	1433	670 KK

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2010

2. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi nara sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian wakil dari populasi yang diteliti (Rosady Ruslan, 2003: 139). Dalam menarik sampel peneliti menggunakan rumus Slovin (Rosady Ruslan, 2003: 150) yang jumlah populasinya 1433 Orang.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persentase ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat di inginkan 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{1433}{1 + 1433 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{1433}{1+1433 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{1433}{1+1433 (0,01)}$$

$$n = \frac{1433}{14,34}$$

$$n = 100$$

$$n = 100 \text{ Orang}$$

Dari uraian rumus slovin diatas yang menjadi sample 100 orang ini yaitu termasuk petugas aparat pemerintahan desa seperti, kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, RT dan RW, kemudian ditambah dengan masyarakat.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Suryabrata, 2003: 39).
2. Data sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1. Wawancara yaitu peneliti mengadakan tanya jawab kepada responden mengenai permasalahan yang hendak diteliti demi kesempurnaan data yang diperoleh. Data wawancara dapat penulis peroleh dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun.
2. Quisioner yaitu peneliti mengajukan daftar pertanyaan kepada responden mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Quisioner disebarkan pada masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban.
3. Observasi yaitu pengamatan secara langsung oleh peneliti dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada di lapangan.

3.6 Analisa Data

Analisa data yang peneliti gunakan didalam penelitian ini ialah menggunakan metode Deskriptif yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Luas dan Batas Wilayah

Kepenghuluan Tanjung Leban terletak dikecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan luas wilayah 248,77 KM² yang terbagi dalam 3 (tiga) Dusun yaitu, Dusun Tanjung Leban, Dusun Parit Ma'ali, dan Dusun Rantau Benuang. Di tinjau dari letak geografisnya kepenghuluan Tajung Leban mempunyai batas wilayah, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Segajah
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bagan Senombah
3. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Simpang Kanan
4. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Alam

Sedangkan Kepenghuluan Tanjung leban terletak di kota kecamatan, jarak dari Kabupaten dan propinsi adalah sebagai berikut:

- 1 Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten 30 Km.
2. Jarak dari pusat pemerintahan Propinsi 3000 Km.

4.2 Penduduk

Masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban merupakan masyarakat yang heterogen, dimana daerah ini dihuni berbagai suku bangsa, antara lain melayu, jawa, batak, dan minang. Masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban mayoritas

adalah melayu dan jawa dimana yang dulunya daerah ini dibuka pertama kali oleh orang jawa dan melayu. Untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban Berdasarkan Suku

No	Jenis Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu	970	67,69%
2	Jawa	320	22,33%
3	Batak	56	3,90%
4	Minang	87	6,07%
Jumlah		1433	100%

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bersuku melayu lebih tinggi dari pada penduduk yang bersuku jawa, batak, dan minang. Dengan jumlah 970 orang atau (67,69%) yang bersuku melayu di Kepenghuluan Tanjung Leban. Ini disebabkan pada waktu pembukaan desa Kepenghuluan Tanjung Leban banyak dihuni oleh orang melayu, kemudian datanglah orang transmigrasi dari jawa, medan dan daerah lainnya. Alasan mereka yang pindah dari daerah lain ke Kepenghuluan Tanjung Leban ini karena tanah kepenghuluan tanjung leban cocok untuk perkebunan sawit.

Berdasarkan data statistic pada Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2010, jumlah penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban berjumlah 670 KK dan keseluruhan 1433 orang, terdiri dari laki-laki berjumlah 710 orang dan perempuan 723 orang dari 670 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.2 berikut ini:

Table 4.2 Penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	710	49,54%
2	Perempuan	723	50,45%
Jumlah		1433	100%

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2010

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Dengan 710 orang dan persentasenya 49,54% laki-laki, kemudian perempuan 723 orang dengan persentasenya 50,45%. Jadi dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin lebih banyak jenis kelamin perempuan dari pada laki-laki. Seharusnya banyaknya jenis kelamin perempuan juga dapat mendukung tingginya partisipasi masyarakat. Jenis kelamin perempuan diharuskan bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan setidaknya dapat memberikan ide-ide atau pemikiran yang merupakan keputusan untuk kelancaran dalam kegiatan pembangunan.

4.3 Penduduk Menurut Usia

Didalam masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban terdapat urutan usia yaitu dari 0-5 tahun, 6-16 tahun, 17-25 tahun, 26-55 tahun, 56 tahun keatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 4.3 Penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban Menurut Tingkat Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	0-5 Tahun	130	9,07%
2	6-16 Tahun	197	13,74%
3	17-25 Tahun	321	22,40%
4	26-55 Tahun	730	50,94%
5	56 Tahun Keatas	55	3,83%
	Jumlah	1433	100%

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2010

Dari uraian tabel penduduk menurut tingkat usia diatas dapat diketahui bahwa penduduk menurut usia yang paling banyak yaitu 26-55 tahun dikategorikan orang dewasa berjumlah 730 orang atau (50,94%). Kemudian

penduduk menurut usia yang paling sedikit yaitu umur 56 tahun keatas dikategorikan usia lanjut atau lansia berjumlah 55 orang atau (3,83%).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut umur yang terbanyak adalah usia 26-55 yang merupakan umur pro aktif. Seharusnya usia yang pro aktif dapat menunjang tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dari pada usia remaja, lansia dan lainnya, terutama berpartisipasi menyumbangkan tenaga dan ide-ide atau pikiran.

4.4 Mata Pencabarian

Melihat dari segi social ekonomi masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban umumnya mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam yang sebagian besarnya yaitu mempunyai mata pencaharian petani kelapa sawit, nelayan, dan lain-lain. Ini disebabkan perlanahan yang ada di Kepenghuluan Tanjung Leban mengizinkan untuk bertani sawit dan sebagian masyarakat yang mempunyai waktu luang untuk mencari ikan atau nelayan sebagai kerja sampingan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban Menurut Faktor Pekerjaan

No	Klasifikasi Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani Kelapa Sawit	976	68,10%
2	Nelayan	67	4,67%
3	Pegawai Negeri Sipil	15	1,04%
4	Pegawai Swasta	9	0,62%
5	Pedagang	8	0,55%
6	Wiraswasta	11	0,76%
7	Pertukangan	7	0,48%
8	Pension	2	0,13%
10	Kesehatan	4	0,27%
11	Lain-lain	334	23,30%
Jumlah		1433	100%

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat pencaharian yang paling dominan adalah pertanian kelapa sawit dengan jumlah penduduk sebanyak 976 orang atau (68,10%). Sedangkan mata pencaharian sebagai nelayan berjumlah 67 orang atau (4,67%), pegawai negeri sipil-15 Orang atau (1,04%), dan untuk pekerjaan sebagai pegawai swasta 9 orang (0,62%). Kemudian yang mempunyai pekerjaan sebagai pedagang berjumlah 8 orang (0,55%). Sedangkan wiraswasta berjumlah 11 orang (0,76%). Sedangkan pertukangan 7 orang (0,48%), dan pensiun 2 orang (0,13%). Pekerjaan bidang kesihatan 4 orang (0,27%), dan masyarakat lain-lain yang berjumlah 334 orang.

Petani kelapa sawit disini tidak dikategorikan masyarakat yang seluruhnya mempunyai kebun kelapa sawit yang sudah jadi. Namun petani kelapa sawit disini diartikan masyarakat yang membuka lahan, buruh untuk pertanian kelapa sawit juga disebut petani kelapa sawit.

4.5 Pendidikan

Pendidikan adalah sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat social serta perekonomian seseorang. Dalam usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (mental), membuka sekolah umum, sekolah agama di Kepenghuluan Tanjung Leban. Dalam hal pemerintahan juga tidak pernah berhenti untuk membangun dan membuat sarana dan prasarana untuk mendidik agar Kepenghuluan Tanjung

Leban tidak tertinggal dengan desa-desa lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut ini:

Table 4.5 Jumlah Sarana Pendidikan di Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar Negeri	2 Buah
2	Madrasah Diniyah Awaliyah	2 Buah
3	SMP Yayasan	1 Buah
Jumlah		5 Buah

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2010

Dari table diatas, maka sarana pendidikan di Kepenghuluan Tanjung Leban belum cukup memadai; untuk meningkatkan kecerdasan anak didik.

Kemudian dapat diketahui juga dari tingkat pendidikan penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk di Lihat dari Tingkat Pendidikan

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Buta Aksara dan Angka	20	1,39%
2	Belum Sekolah	375	26,16%
3	Tidak Tamat SD	340	23,72%
4	Tamat Sekolah Dasar	490	34,19%
5	SLTP/Sederajat	140	9,76%
6	SLTA/Sederajat	45	3,14%
7	Akademi	10	0,69%
8	Sarjana	13	0,90%
Jumlah		1433	100%

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2010

Dilihat pada tabel 4.6 diatas tingkat pendidikan penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban yang paling besar adalah tamat sekolah dasar 490 orang atau (34,19%), ini termasuk usia-usia muda yang mata pencahariannya petani kelapa sawit, kemudian yang belum sekolah 375 orang (26,16%), selanjutnya tamat SLTP sederajat berjumlah 140 orang (9,76%), tamat SLTA sederajat berjumlah 45 orang (3,14%). Untuk masyarakat yang mendapat ilmu di akademik berjumlah 10 orang (0,69%) dan lulusan perguruan tinggi berjumlah 13 orang (0,90%).

Walaupun masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban tidak berpartisipasi dalam bentuk pemikiran, ide-ide dikarenakan tamatan SD, namun masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban juga bisa berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan waktu.

4.6 Pemerintahan

Kepenghuluan Tanjung Leban adalah salah satu desa yang berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Kepala desa atau disebut dengan Datuk Penghulu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Dan selanjutnya dibentuk pula dusun-dusun yang selanjutnya dipimpin oleh kepala dusun, RW (Rukun Warga), dan dibawah RW ada RT (Rukun Tetangga). Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun jumlah aparat pemerintahan Kepenghuluan Tanjung Leban dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Jumlah Aparat Pemerintah Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Aparat Pemerintah	Jumlah
1	Kepala Desa (Datuk Penghulu)	1
2	Sekretaris Desa (Sekdes)	1
3	Kepala Dusun	4
4	Rukun Warga (RW)	5
5	Rukun Tetangga (RT)	17
Jumlah		28

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2010

4.7 Kesehatan

Dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan, pemerintah telah mendirikan satu buah puskesmas yang buka setiap hari senin sampai dengan hari

sabtu bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Bila dilihat dari intensitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban yang membuka Puskesmas dari hari senin sampai hari sabtu, masih dirasakan kurang oleh masyarakat akibat kurangnya alat medis yang tersedia. Akan tetapi karena Kepenghuluan Tanjung Leban dekat dengan beberapa desa disekitarnya maka masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban biasanya datang berobat ke tempat praktek Dokter di desa tetangga dan bila sakitnya lebih kronis langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir bertempat di Bagan Siapiapi.

4.8 Agama

Terutama sekali dalam kehidupan berbangsa yang paling penting adalah agama, agama adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Masyarakat di Kepenghuluan Tanjung Leban mayoritas beragama Islam. Dan ada sedikit penduduk yang menganut agama Kristen Protestan ini hanya masyarakat transmigrasi dari daerah lain yang membuat kebun dan bertempat tinggal di Desa Kepenghuluan Tanjung Leban. Dari table berikut dapat dilihat jumlah penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban menurut agama dibawah ini.

Tabel 4.8. Jumlah Penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban menurut agama

No	Klasifikasi Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	1377	96,09%
2	Kristen Protestan	56	3,90%
Jumlah		1433	100%

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2010

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban mayoritas adalah pemeluk agama Islam dengan jumlah 1377 orang (96,09%). Sedangkan yang memeluk agama Kristen Protestan berjumlah 56 Orang dengan persentase (3,90%). Banyaknya masyarakat yang menganut agama islam seharusnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan lebih tinggi, dikarena dalam kegiatan partisipasi inilah terjalinnya tali silaterrahmi antara masyarakat dusun satu dengan yang lainnya.

Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah, di dukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan agamanya. Sarana rumah ibadah di Kepenghuluan Tanjung Leban hanya terdapat bagi masyarakat yang beragama islam dan agama Kristen Protestan. Banyaknya sarana ibadah bagi masyarakat yang beragama Islam dan Kristen Protestan dapat dilihat pada table berikut:

Table 4.9 Jumlah Rumah Ibadah di Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6 Buah
2	Musholla	4 Buah
3	Gereja	1 Buah
	Jumlah	11 Buah

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2010

Maka dari table diatas dapat diketahui bahwa di Kepenghuluan Tanjung Leban cukup sarana untuk melaksanakan ibadah. Keberadaan sarana ibadah (mesjid dan musholla) ini selain digunakan sebagai tempat beribadah, juga difungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni baca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian bagi remaja dan orang tua.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Identitas Responden Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan angket yang disebarkan maupun wawancara langsung dapat diklasifikasi mengenai keberadaan responden yang menjadi nara sumber dalam penelitian mengenai Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

5.1.1. *Identitas Responden Menurut Tingkat Umur*

Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
3	15-20 Tahun	40	40%
4	21-55 Tahun	57	57%
5	56 Tahun Keatas	3	3%
Jumlah		100	100%

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2010

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden berumur 21-55 tahun dan responden yang paling sedikit yaitu 56 tahun keatas, sebab umur yang 21-55 tahun masih aktif fisik dan pengingatnya masih kuat. Sedangkan yang berumur lansia atau 56 tahun keatas fisik dan pengingatnya sudah lemah ini disebabkan pengaruh umur.

5.1.2. *Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin*

Adapun identitas responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut:

Table 5.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	55	55%
2	Perempuan	45	45%
	Jumlah	100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Berdasarkan table identitas responden menurut jenis kelamin diatas dapat diketahui jenis kelamin penelitian ini untuk laki-laki berjumlah 55 orang (55%) dan perempuan berjumlah 45 (45%).

Jadi dari jumlah responden berdasarkan jenis kelamin lebih banyak jenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. Seharusnya banyaknya jenis kelamin laki-laki merupakan gerak yang aktif untuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Karena jenis kelamin laki-laki adalah perwakilan dari rumah tangga masing-masing keluarga. Responden paling sedikit jenis kelamin perempuan. Walaupun jenis kelamin perempuan sedikit dalam pengambilan responden namun bisa juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan setidaknya dapat memberikan ide-ide atau pemikiran yang merupakan keputusan untuk kelancaran dalam kegiatan pembangunan.

5.1.3. Identitas Responden Menurut Pendidikan

Untuk melihat tingkat pendidikan yang diraih oleh responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 5.3. berikut ini:

Table 5.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	51	51%
2	SMP	22	22%
3	SMA	24	24%
4	Akademi/Sarjana	3	3%
	Jumlah	100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Dari table diatas terlihat pendidikan yang diraih oleh reponden yang paling terbanyak adalah pada tingkat Sekolah Dasar berjumlah 51 orang (51%). Dari minimnya pendidikan masyarakat bukan berarti mengurangi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Seharusnya pendidikan masyarakat yang tamatan SD tidak mampu memberikan partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran namun bisa memberikan partisipasi dalam bentuk tenaga.

5.1.4. Identitas Responden Berdasarkan Mata Pencapaian

Identitas responden berdasarkan mata pencapaian sehari-hari dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4 Identitas Responden Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Klasifikasi Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani Kelapa Sawit	68	68 %
2	Nelayan	12	14 %
3	Pegawai Negeri Sipil	4	4 %
6	Wiraswasta	10	10 %
8	Pensiun	2	2 %
10	Kesehatan	4	0,27%
Jumlah		100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Identitas responden berdasarkan mata pencapaian dapat diketahui yang paling tinggi persentasenya di teliti oleh penulis yaitu petani kelapa sawit dengan jumlah 68 Orang atau (68%), ini disebabkan di Kepenghuluan Tanjung Lebau mayoritas masyarakatnya bermata pencapaian petani kelapa sawit. Dan sebagian dari responden bermata pencapaian nelayan berjumlah 12 Orang atau (12%), karena di Kepenghuluan Tanjung Leban dekat dengan sungai. Mata pencapaian responden yang terbanyak yaitu petani sawit karena tanah di Kepenghuluan Tanjung Leban sangat cocok untuk lahan untuk bertani sawit.

5.2 Analisis Partisipasi

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu pemilihan maupun pembangunan yang diadakan oleh pemerintah demi kemajuan suatu Negara kesatuan. Ramlan Subakti (1999: 140) mengemukakan partisipasi adalah keikutsertaan warga Negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban lebih mengutamakan pekerjaan dari pada ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa, karena mereka beranggapan lain terhadap pembangunan pada suatu desa, pembangunan hanyalah tugas dari pemerintahan dan bila di bantu oleh swadaya masyarakat akan memberikan keuntungan pada Negara.

Disaat melakukan gotong royong atau rapat Desa dalam kegiatan pembangunan masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban lebih mementingkan pekerjaannya dari pada ikut berpartisipasi. Masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban mempunyai kemampuan yang sederhana dibandingkan dengan desa lain tingkat pendidikannya sudah meningkat.

5.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat setiap kali diadakannya kegiatan pembangunan desa cenderung turun dari tahun-ketahun yang ikut berpartisipasi. Ini dikatakan oleh Kepala Desa Kepenghuluan Tanjung Leban oleh Bapak Syafi'i Jais saat diwawancarai oleh penulis dalam mengambil data. Kecendrungan penurunan

sebesar 70% sejak tahun 2007 sampai pada tahun 2008, pada tahun 2010 ini kecendrungan masyarakat berpartisipasi tinggal 30%.

Partisipasi merupakan, keikutsertaan seseorang dalam sebuah kegiatan, dalam kegiatan pembangunan Desa diharapkan adalah partisipasi masyarakat dalam mensukseskan kegiatan pembangunan desa. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat pada bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi dalam bentuk material dan imaterial. Partisipasi material dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam bentuk uang dan barang, sedangkan yang imaterial dapat dibagi menjadi waktu dan pemikiran, sumbangan tenaga, dan partisipasi dalam bentuk budaya.

5.3.1. Partisipasi material

1. Partisipasi dalam bentuk uang

Uang merupakan barang berharga yang digunakan sebagai alat tukar yang syah untuk transaksi dagan didunia. Uang harus didapatkan dengan usaha maksimal agar hasil yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan. Keterlibatan masyarakat dalam menyumbang uang pada proses pembangunan dapat dijadikan ukuran bahwa secara ekonomi masyarakat sudah banyak yang layak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 5.5 dibawah ini:

Tabel 5.5 Distribusi Jawaban Responden Tentang Sumbangan Uang yang Diberikan untuk Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	35	35%
2	Kadang-kadang	25	25%
3	Tidak Pernah	40	40%
Jumlah		100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 orang responden, mayoritas responden menjawab tidak pernah memberikan sumbangan dalam bentuk uang untuk kegiatan pembangunan yakni 40 orang (40%).

Kemudian hasil wawancara pada Bapak Agus yaitu selaku Sekdes menyatakan (wawancara, Januari 2011). "Masih banyak masyarakat yang tidak pernah memberikan sumbangan dalam bentuk uang, karena masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban masih sibuk dalam membuka lahan pertanian kelapa sawit sehingga uang mereka banyak digunakan untuk kepentingan kehidupan sehari-hari". Kurangnya masyarakat dalam memberikan sumbangan ini merupakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun desanya sendiri.

2. Partisipasi dalam bentuk barang

Selain partisipasi dalam bentuk uang partisipasi dalam bentuk barang juga diperlukan dalam pembangunan. Partisipasi dalam bentuk barang yang dilakukan masyarakat dapat berupa barang perlengkapan pembangunan. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam bentuk barang dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut ini:

Tabel 5.6 Distribusi Jawaban Responden Tentang Sumbangan Barang untuk Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	46	46%
2	Kadang-kadang	10	10%
3	Tidak Pernah	44	44%
Jumlah		100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab sering melakukan sumbangan dalam bentuk barang yakni sebanyak 46 orang atau

(46%). Responden tidak merasa keberatan memberikan sumbangan dalam bentuk barang. Hal ini disebabkan sumbangan dalam bentuk barang seperti papan atau alat balok lainnya tidak dibeli tetapi hanya menyediakan peralatan untuk memotong kayu seperti mesin potong kayu. Karena desa Tanjung Leban masih banyak hutan-hutan besar yang dapat menghasilkan bahan-bahan material berbentuk barang, berarti Desa Kepenghuluan Tanjung Leban masih dalam tahap pembukaan.

5.3.2. *Partisipasi Immaterial*

a. Waktu dan Pikiran

Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan yang jika membangun suatu daerah. Karena masyarakat sangat berperan dalam kegiatan pembangunan, dengan menyumbang dari material maupun in material. Salah satunya waktu dan pikiran merupakan satu hal sumbangan dari masyarakat yang berbentuk partisipasi immaterial.

Dari beberapa waktu dan pikiran yang diberikan oleh masyarakat melalui partisipasi ini terciptalah suatu keputusan. Keputusan atas dasar tuntunan rakyat, yang kemudian diterjemahkan oleh pemerintahan untuk memikirkan bagaimana teknis dan strategis dalam mengimplementasikannya.

Tercapai atau tidaknya strategi tersebut ditentukan oleh respon yang timbul dari masyarakat sebagai subyek dan obyek kebijakan pembangunan yang ditandai dengan adanya upaya untuk terlibat pada proses pembangunan daerah (dalam skop kecil disebut dengan desa).

Untuk lebih jelasnya partisipasi masyarakat dari sisi waktu kehadiran mengikuti rapat dapat dilihat dari jawaban responden berikut ini:

Tabel 5.7 Distribusi Jawaban Responden Tentang Waktu/Kehadiran Mengikuti Rapat dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	30	30%
2	Kadang-kadang	23	23%
3	Tidak Pernah	47	47%
	Jumlah	100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Dari tabel data diatas dapat diketahui mayoritas responden menjawab tidak pernah meluangkan waktu untuk mengikuti rapat terkait dalam kegiatan pembangunan yakni 47 orang atau (47%). Data tersebut didukung oleh wawancara pada Bapak Syafii Jais selaku Kepala Desa Kepenghuluhan Tanjung Leban: "Kurang nya masyarakat berpartisipasi dalam bentuk waktu untuk kehadiran rapat dikarenakan masyarakat sibuk mencari uang untuk kehidupan sehari-hari dan mereka beranggapan pembangunan desa seharusnya dibentuk oleh pemerintahan daerah." (Wawancara: Januari 2011).

Selanjutnya disamping sumbangan waktu dalam bentuk kehadiran mengikuti rapat maka sumbangan dalam bentuk pemikiran demi kelancaran kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan dari semua elemen masyarakat. Untuk lebih jelasnya jawaban responden tentang sumbangan pemikiran yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8 Distribusi Jawaban Responden Tentang Kebiasaan Memberikan Sumbangan Pemikiran

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	25	25%
2	Kadang-kadang	35	35%
3	Tidak Pernah	40	40%
	Jumlah	100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Berdasarkan data diatas dapat diketahui mayoritas responden menjawab tidak pernah memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran yakni 40 orang atau (40%). Karena mayoritas responden tamatan SD sehingga mereka merasa pemikiran mereka tidak ditanggapi oleh pemerintah desa. Kemudian mereka juga tidak terbiasa menyampaikan sumbangan dalam bentuk pemikiran sehingga takut dalam menyampaikan komentar dalam pemikirannya.

b. Tenaga

Kemudian sumbangan tenaga yang dilakukan oleh masyarakat juga sangat diperlukan dalam setiap kegiatan pembangunan, hal ini demi kelancaran kegiatan pembangunan. Untuk lebih jelasnya jawaban responden tentang sumbangan tenaga yang diberikan dapat dilihat Pada tabel berikut:

Tabel 5.9 Distribusi Jawaban Responden Tentang Sumbangan Tenaga dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	21	21%
2	Kadang-kadang	47	47%
3	Tidak	32	32%
Jumlah		100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Dapat diketahui dari tabel diatas mayoritas responden menjawab kadang-kadang yakni 47 orang atau (47%). Dari mayoritas responden yang menjawab kadang-kadang sebab masyarakat mempunyai kesibukan bekerja sehari-hari, jika ada waktu luang masyarakat bisa menyumbangkan tenaga dalam kegiatan pembangunan. Begitu pula sebaliknya jika masyarakat mempunyai kesibukan bekerja untuk kehidupan sehari-harinya masyarakat tidak bisa menyumbangkan tenaganya.

Tabel 5.10 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat

Indikator Penelitian		Kategori Jawaban			Jumlah
Sumbangan Material		Sering/Selalu	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
a	Uang	35 (35%)	25 (25%)	40 (40%)	100
b	Barang	46 (46%)	10 (10%)	44 (44%)	100
Jumlah		40,5 (4,5%)	17,5 (17,5%)	42 (42%)	100
Sumbangan Imaterial		Sering/Selalu	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Jumlah
a	Waktu	30 (30%)	23 (23%)	47 (47%)	
	Pemikiran	25 (25%)	35 (35%)	40 (40%)	100
b	Tenaga	21 (21%)	47 (47%)	32 (32%)	100
Jumlah		25,33 (25,33%)	35 (35%)	39,66 (39,66%)	100

Sumber : Olahan Penelitian 2011

Dari tabel rekapitulasi diatas jawaban responden tentang sumbangan dalam bentuk material yang menyatakan sering/selalu 40 atau (40%), kadang-kadang 17,5 (17,5%), dan yang menyatakan tidak pernah 42 atau (42%). Dari pernyataan tersebut bahwa partisipasi masyarakat sangat rendah karena jawaban responden membuktikan 42 atau (42%) orang yang menyatakan tidak pernah berpartisipasi dalam bentuk uang ataupun barang.

Kemudian hasil rekapitulasi jawaban responden yang menyatakan sering berpartisipasi dalam bentuk imaterial berjumlah 25,33 (25,33%), kadang-kadang 35 (35%), dan yang menyatakan tidak pernah 39,66 atau (39,66%). Jadi dapat ketahui dari hasil responde yang menjawab tertinggi yaitu masyarakat Kepenghuluhan Tanjung Leban tidak pernah berpartisipasi dalam bentuk Imaterial berjumlah 39,66 atau (39,66%).

Dari penjelasan diatas bahwa partisipasi masyarakat Kepenghuluhan Tanjung Leban sangat kurang sekali, masyarakat Kepenghuluhan Tanjung Leban

lebih mementingkan mencari nafkah kehidupan sehari-hari dari pada ikut berpartisipasi, baik partisipasi dalam bentuk material maupun immaterial. Hal ini terdapat mayoritas responden menjawab tidak pernah melakukan partisipasi masyarakat dalam bentuk uang dan barang 42 orang (42%). Dan responden menjawab tidak pernah berpartisipasi dalam bentuk waktu kehadiran mengikuti rapat, pemikiran, dan tenaga yakni 39,66 atau (39,66%)

5.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Desa Kepenghuluan Tanjung Leban

Angell dalam Ross (<http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat>), mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

Usia responden yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu 15-20 Tahun, 21-55 Tahun, dan 56 Tahun Keatas. Adapun jawaban responden tentang faktor usia mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Distribusi Jawaban Responden tentang Faktor Usia Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	33	33%
2	Kurang Berpengaruh	59	59%
3	Tidak Berpengaruh	8	8%
	Jumlah	100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Dari tabel diatas mayoritas responden menjawab faktor usia kurang berpengaruh yakni 59 orang (59%). Dari jawaban responden yang menyatakan kurang berpengaruh karena usia remaja, dewasa, dan lansia semuanya sibuk dalam kegiatannya masing-masing. Usia remaja yang sekolah sibuk dalam kegiatan pendidikan, usia dewasa sibuk dengan pekerjaan mencari nafkah kehidupan sehari-hari, dan lansia lemah fisik dan juga pemikirannya.

Ada beberapa kriteria usia yang dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan seperti usia remaja, dewasa, dan lansia. Untuk lebih jelas jawaban responden yang menjawab faktor usia dewasa mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat dilihat pada tabel 5.12 berikut:

Tabel 5.12 Distribusi Jawaban Responden tentang Usia Dewasa Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	23	23%
2	Kurang Berpengaruh	68	68%
3	Tidak Berpengaruh	9	9%
	Jumlah	100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Usia masyarakat dewasa kurang berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Dari 100 responden yang menyatakan kurang berpengaruh 68 orang atau (68%), sebab usia masyarakat yang dewasa masih disibuk bekerja untuk mencari nafkah. Untuk menguatkan data diatas penulis melakukan wawancara pada seorang masyarakat Kepenghuluan Tanjung Lahan

yaitu Bapak Salim mengatakan “Banyak masyarakat yang dewasa disibukkan bekerja membuka lahan pertanian sawit, baik itu lahan sendiri maupun menjual jasa. Jadi masyarakat yang usia menengah keatas jarang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan”. (wawancara: januari 2011)

Selain dari usia dewasa ada juga disebut dengan usia remaja dan lansia yang bisa ikut dalam partisipasi masyarakat. Kemudian untuk usia remaja dan lansia, bagaimana masyarakat usia ini terhadap partisipasi dalam kegiatan pembangunan, dapat pula dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Distribusi Jawaban Responden tentang Usia Remaja dan Lansia Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	30	30%
2	Kurang Berpengaruh	59	59%
3	Tidak Berpengaruh	11	11%
Jumlah		100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Dapat diketahui dari tabel diatas responden yang menyatakan berpengaruh usia remaja dan lansia berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan berjumlah 30 orang atau (30%), sedangkan yang menyatakan kurang berpengaruh 59 orang (59%), dan yang menyatakan tidak berpengaruh 11 orang atau (11%).

Biasanya usia remaja masih disibukkan dalam kegiatan sekolah sehingga menimbulkan kurang berpengaruh pada partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Begitu juga dengan lanjut usia atau lansia kurang berpengaruh dalam partisipasi dalam kegiatan pembangunan ini disebabkan masyarakat yang lanjut usia mengalami lemah fisik, pikiran, dan tenaga.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. Jenis kelamin juga berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Adapun jawaban responden tentang faktor jenis kelamin mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.14 Distribusi Jawaban Responden tentang Jenis Kelamin Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	39	39%
2	Kurang Berpengaruh	51	51%
3	Tidak Berpengaruh	10	10%
Jumlah		100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Adapun keterangan dari tabel diatas yang menyatakan faktor jenis kelamin berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan berjumlah 39 orang (39%), sedangkan yang menyatakan kurang berpengaruh 51 orang atau (51%), dan yang menyatakan tidak berpengaruh 10 orang (10%). Dari penjelasan tersebut maka responden menjawab tentang factor jenis kelamin kurang berpengaruh pada partisipasi masyarakat. Ini disebabkan karena masyarakat yang ikut dalam partisipasi adalah sebagian yang jenis kelaminnya laki-laki, baik itu partisipasi dalam bentuk material maupun imaterial. Namun jenis kelamin laki-laki juga disebutkan bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

Laki-laki ada kepala rumah tangga dan perwakilan dari rumah tangganya sendiri. Apapun kegiatan kemasyarakatan yang pastinya laki-laki diharuskan ikut dalam kegiatan kemasyarakatan termasuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui jawaban responden pada tabel 5.15 berikut ini:

Tabel 5.15 Distribusi Jawaban Responden tentang Jenis Kelamin Laki-laki Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	54	54%
2	Kurang Berpengaruh	42	42%
3	Tidak Berpengaruh	4	4%
	Jumlah	100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui responden yang menyatakan faktor jenis kelamin laki-laki berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban berjumlah 54 orang atau (54%), sedangkan responden yang menjawab kurang berpengaruh berjumlah 42 orang (42%), dan yang menyatakan tidak berpengaruh 4 orang atau (4%). Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Bapak Abul Qosim sebagai pendiri SMP yayasan Abul Qosim menyatakan "Di Kepenghuluan Tanjung Leban masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan semuanya jenis kelamin laki-laki, masyarakat di Kepenghuluan Tanjung Leban mengatakan peran seorang wanita itu adalah di rumah". (Wawancara: Januari 2010).

Jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebenarnya dalam partisipasi masyarakat tidak ada membedakan. Perempuan juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan tidak seharusnya jenis kelamin perempuan mengurus

anak dan rumah. Untuk lebih rincinya tentang jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.16 Distribusi Jawaban Responden tentang Jenis Kelamin Perempuan Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	2	2%
2	Kurang Berpengaruh	48	48%
3	Tidak Berpengaruh	50	50%
Jumlah		100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa banyak responden yang menyatakan jenis kelamin perempuan tidak berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan berjumlah 50 orang atau (50%). Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Abul Qosim pada wawancara ditabel 5.16.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pendidikan sangat terkait dengan aktivitas mulia manusia yang tugasnya utamanya adalah membantu pengembangan humanitas manusia untuk menjadi manusia berkepribadian mulia utama menurut karakteristik idealitas manusia yang diinginkan. Aktivitas mulia yang termasuk pada pendidikan ini juga membentuk partisipasi masyarakat yang juga mempunyai pengaruh. Kemudian untuk lebih jelasnya jawaban responden tentang faktor pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.17 Distribusi Jawaban Responden tentang Pendidikan Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	51	51%
2	Kurang Berpengaruh	47	47%
3	Tidak Berpengaruh	2	2%
	Jumlah	100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Dapat diketahui tabel diatas responden yang menyatakan faktor pendidikan berpengaruh pada partisipasi masyarakat berjumlah 51 orang atau (51%), sedangkan yang menyatakan kurang berpengaruh berjumlah 47 orang (47%), dan yang menyatakan tidak berpengaruh 2 orang (2%).

Menurut Dr. Amril M. M.A mengatakan pendidikan sangat diperlukan mengingat manusia memiliki potensi-potensi dalam taraf kodrat human dignity (martabat manusia) yang memiliki kesadaran diri yang mendorongnya untuk merealisasikan berbagai potensinya sehingga berkembang dengan baik menjadi self realization (realisasi diri) yang akan menentukan bagi penunjukan jati dirinya yang ideal, agar dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan kehidupan bermasyarakat. (2005: 30-31). Dapat diketahui bahwa pendidikan bisa menimbulkan kesadaran seseorang baik bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun bagi kemasyarakatan dalam partisipasi. Jadi jelas pendidikan juga berpengaruh dalam partisipasi masyarakat seperti pada jawaban tabel diatas yang menyatakan berpengaruh lebih banyak berjumlah 51 orang atau (51%).

Biasanya yang kuat kesadaran adalah masyarakat yang berpendidikan tinggi dalam melakukan kegiatan untuk dirinya maupun bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut ini:

Tabel 5.18 Distribusi Jawaban Responden tentang Pendidikan yang Lebih Tinggi Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	41	41%
2	Kurang Berpengaruh	51	51%
3	Tidak Berpengaruh	8	8%
Jumlah		100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Dari tabel diatas mayoritas jawaban responden yakni kurang berpengaruh berjumlah 51 orang atau (51%). Penulis melakukan wawancara kepada Khoruddin, S.Pdi sebagai guru Yayasan Abul Qosim mengatakan: "Pendidikan artinya kesadaran atau usaha sadar, jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin kuat kesadaran seseorang dalam melakukan aktivitasnya termasuk dalam melakukan partisipasi dalam kegiatan pembangunan, namun masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban yang pernah menuntut ilmu dipendidikan tinggi kurang berpengaruh untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Karena masyarakat yang pernah menuntut ilmu dipendidikan tinggi banyak yang kerja di luar daerah atau di kota-kota".

Sikap hidup seseorang dapat juga ditentukan oleh pendidikan, baik itu sesama manusia maupun terhadap lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.19 Distribusi Jawaban Responden tentang Pendidikan dapat Mempengaruhi Sikap Hidup Seseorang Terhadap Lingkungan Masyarakat dalam Berpartisipasi

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	34	34%
2	Kurang Berpengaruh	54	54%
3	Tidak Berpengaruh	12	12%
Jumlah		100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Hasil penelitian pada tabel diatas dapat dijelaskan distribusi jawaban responden tentang pendidikan dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungan masyarakat dalam berpartisipasi. Banyak responden yang meniawab kurang berpengaruh yakni 54 orang atau (54%). Karena orang yang berpendidikan tinggi tidak sering ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan malahan masyarakat yang tamatan SD yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan berbentuk sumbangan tenaga. Maka dari itu responden beranggapan pendidikan kurang berpengaruh terhadap sikap hidup seseorang kepada lingkungan masyarakat dalam berpartisipasi.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. Kemudian jawaban responden terkait dengan faktor pekerjaan dan penghasilan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.20 Distribusi Jawaban Responden tentang Pekerjaan dan Penghasilan Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	69	69%
2	Kurang Berpengaruh	31	31%
3	Tidak Berpengaruh	-	-%
Jumlah		100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2013

Dapat diketahui factor pekerjaan dan penghasilan masyarakat sangat berpengaruh bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluhan Tanjung Leban. Hal ini berasal dari jawaban responden yang terbanyak berjumlah 69 orang atau (69%). Sementara responden yang menjawab kurang berpengaruh berjumlah 31 orang atau (31%), dan tidak ada responden yang menyatakan tidak berpengaruh.

Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.21 Distribusi Jawaban Responden tentang Perekonomian yang Mapan Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	67	67%
2	Kurang Berpengaruh	33	33%
3	Tidak Berpengaruh	-	- %
	Jumlah	100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Dari tabel diatas responden menjawab 67 orang atau (67%) yang menyatakan berpengaruh, kemudian yang menyatakan kurang berpengaruh berjumlah 33 orang atau (33%). Perekonomian masyarakat yang mapan sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan berpengaruh berjumlah 67orang atau (67%). Untuk lebih lengkapnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Salim selaku masyarakat Dusun Rantau Benuang mengatakan: "Masyarakat juga harus mempunyai ekonomi yang mapan, dengan ekonomi yang mapan masyarakat tidak menghiraukan pekerjaan untuk mencari nafkah, kemudian masyarakat bisa ikut berpartisipasi (wawancara, Januari: 2011).

Perekonomian yang mapan berasal dari penghasilan masyarakat yang mencukupi. Sementara itu penghasilan masyarakat juga tergantung terhadap pekerjaan masyarakat. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.22 Distribusi Jawaban Responden tentang Pekerjaan Masyarakat Berpengaruh Terhadap Penghasilan yang diperoleh

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	51	51%
2	Kurang Berpengaruh	45	45%
3	Tidak Berpengaruh	4	4 %
Jumlah		100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Dari tabel 5.22 diatas, kebanyakan responden menjawab berpengaruh berjumlah 51 orang (51%). Karena sering seseorang bekerja untuk mencari nafkah maka makin besar penghasilan yang diperoleh baik itu dalam jangka waktu cepat maupun lambat.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Dari hasil jawaban responden dapat dilihat lebih rinci pada tabel 5.23 berikut ini:

Tabel 5.23 Distribusi Jawaban Responden tentang lamanya tinggal Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	32	32%
2	Kurang Berpengaruh	52	52%
3	Tidak Berpengaruh	16	16%
Jumlah		100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Adapun mayoritas responden menjawab kurang berpengaruh lamanya tinggal terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan hal ini terdapat pada jawaban responden yakni 52 orang atau (52%).

Data ini didukung oleh hasil wawancara penulis kepada Bapak Syafi'i Jais selaku kepala desa di Kepenghuluan Tanjung Leban mengatakan: "masyarakat yang lama tinggal disini tidak begitu aktif atau kurang berpengaruh berpartisipasi dalam pembangunan desa. Karena masyarakat yang lama tinggal disini sudah terbiasa dengan pembangunan yang apa adanya. Namun sebaliknya masyarakat yang transmigrasi berasal dari Jawa, Medan, dan sebagainya lebih berpengaruh berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa". (wawancara: Januari 2011)

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Jawaban responden terhadap pengalaman masyarakat berinteraksi dengan lingkungan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.24 Distribusi Jawaban Responden tentang Pengalaman Masyarakat Berinteraksi dengan lingkungan Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	30	30%
2	Kurang Berpengaruh	59	59%
3	Tidak Berpengaruh	11	11%
Jumlah		100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui, berinteraksi kurang berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan hal ini dapat dilihat jawaban dari 100 orang responden yang menjawab kurang berpengaruh 59 orang atau (59%). Karena masyarakat hanya berinteraksi terhadap masyarakat disaat mau

berangkat kerja dan membuat kelompok pertanian. Jika kelompok pertanian bubar maka interaksi antara satu sama lain jarang dilakukan, sehingga kurang berpengaruh terhadap partisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Kemudian semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. Dari 100 orang responden memberikan jawaban yang terdapat pada tabel 5.25 berikut:

Tabel 5.25 Distribusi Jawaban Responden tentang Rasa Memiliki Suatu Daerah Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	64	64%
2	Kurang Berpengaruh	26	26%
3	Tidak Berpengaruh	10	10%
	Jumlah	100	100%

Sumber Data: dari lapangan 2011

Rasa memiliki suatu desa tersebut sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat hal ini terdapat mayoritas responden menjawab menyatakan berpengaruh berjumlah 64 orang atau (64%). Karena rasa memiliki ini bisa membuat seseorang ingin memelihara suatu tempat atau barang yang dimiliki. Namun sebaliknya rasa memiliki tidak ada dalam jiwanya maka segala yang terkait baik itu tempat atau barang diabaikan atau dibiarkan saja.

Untuk mengetahui keseluruhan dari kelima indikator terhadap pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, maka rekapitulasi kelima indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.26 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Faktor Usia Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban

Indikator Penelitian		Kategori Jawaban			Jumlah
1. Faktor Usia		Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	
a	Usia terhadap partisipasi masyarakat	33 (33%)	59 (59%)	8 (8%)	100
b	Usia menengah keatas terhadap partisipasi masyarakat	23 (23%)	68 (68%)	9 (9%)	100
c	Usia remaja dan lansia terhadap partisipasi masyarakat	30 (30%)	59 (59%)	11 (11%)	100

Sumber : Olahan Penelitian 2011

Dari tabel diatas 5.26 diatas, dapat dilihat bahwa factor usia menengah keatas (dewasa) dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kepenghuluan dengan hasil pembahasan didapati sebanyak 68% responden yang menyatakan kurang berpengaruh. Karena usia menengah keatas (dewasa) sibuk dalam pekerjaan sehari-hari baik itu membuka lahan pertanian sawit maupun mengambil upah membuka lahan untuk mencari nafkah.

Tabel 5.27 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Faktor Jenis Kelamin Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban

Indikator Penelitian		Kategori Jawaban			Jumlah
2. Faktor Jenis Kelamin		Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	
a	Jenis kelamin terhadap partisipasi masyarakat	39 (39%)	51 (51%)	10 (10%)	100
b	Jenis kelamin laki-laki terhadap partisipasi masyarakat	54 (54%)	42 (42%)	4 (4%)	100
c	Jenis kelamin perempuan terhadap partisipasi masyarakat	2 (2%)	48 (48%)	50 (50%)	100

Sumber : Olahan Penelitian 2011

Dari tabel 5.27 diatas dapat dilihat bahwa factor jenis kelamin laki-laki yang sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Dari hasil pembahasan didapati sebanyak 54% responden yang

menyatakan “berpengaruh” factor jenis kelamin laki-laki berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Tabel 5.28 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Faktor Pendidikan Memengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban

Indikator Penelitian		Kategori Jawaban			Jumlah
3. Faktor Pendidikan		Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	
a	pendidikan terhadap partisipasi masyarakat	51 (51%)	47 (47%)	2 (2%)	100
b	pendidikan masyarakat yang lebih tinggi terhadap partisipasi masyarakat	41 (41%)	51 (51%)	8 (8%)	100
c	pendidikan terhadap lingkungan masyarakat dalam berpartisipasi	34 (34%)	54 (54%)	12 (12%)	100

Sumber : Olahan Penelitian 2011

Adapun Responden menyatakan factor pendidikan berpengaruh terhadap sikap hidup seseorang kepada lingkungan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban, dari hasil pembahasan yang didapat sebanyak 54% yang menyatakan kurang berpengaruh.

Tabel 5.29 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Faktor Pekerjaan dan Penghasilan Memengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban

Indikator Penelitian		Kategori Jawaban			Jumlah
4. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan		Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	
a	pekerjaan dan penghasilan terhadap partisipasi masyarakat	69 (69%)	31 (31%)	-	100
b	Perekonomian yang mapan terhadap partisipasi masyarakat	67 (67%)	33 (33%)	-	100
c	Pekerjaan terhadap penghasilan yang diperoleh	51 (51%)	45 (45%)	4 (4%)	100

Sumber : Olahan Penelitian 2011

Adapun penjelasan dari tabel rekapitulasi diatas bahwa responden menyatakan pekerjaan dan penghasilan berpengaruh bagi masyarakat untuk ikut

berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban. Dari hasil pembahasan responden yang menyatakan berpengaruh 69%.

Tabel 5.30 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Faktor Lamanya Tinggal Mempengaruhi Partisipasi dalam Kegiatan Pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban

Indikator Penelitian		Kategori Jawaban			Jumlah
5. Faktor lamanya tinggal		Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	
a	Lamanya tinggal masyarakat terhadap partisipasi masyarakat	32 (32%)	52 (52%)	16 (16%)	100
b	Pengalaman berinteraksi terhadap partisipasi masyarakat	30 (30%)	59 (59%)	11 (11%)	100
c	Rasa memiliki suatu tempat terhadap partisipasi masyarakat	64 (64%)	26 (26%)	10 (10%)	100

Sumber : Olahan Penelitian 2011

Mengenai factor lamanya tinggal yang sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat yaitu rasa memiliki suatu tempat daerah, hasil tersebut berasal dari jawaban responde berjumlah 64 orang atau (64%). Kalau rasa memiliki sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat yang pastinya suatu barang atau tempat akan dipelihara sebaik mungkin.

Selanjutnya untuk melihat hasil rekapitulasi mengenai factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel 5.31 berikut ini:

Tabel 5.31 Rekapitulasi Jawaban responden tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Indikator	Kategori Jawaban Responden			Jumlah
		Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Tidak berpengaruh	
1	Usia	86	186	28	300
2	Jenis kelamin	95	141	64	300
3	Pendidikan	126	152	22	300
4	Pekerjaan dan penghasilan	187	109	4	300
5	Lamanya tinggal	126	137	37	300
Jumlah		620	725	155	1.500
Rata-rata		124	145	31	300
Persentase		41,33%	48,33%	10,33%	100%

Sumber : Olahan Penelitian 2011

Berdasarkan rekapitulasi tabel diatas, dari 100 orang responden yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Dimana faktor-faktor tersebut yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan/penghasilan, dan lamanya tinggal dapat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa dinyatakan “kurang berpengaruh” untuk lebih jelasnya dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Tanggapan responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan berpengaruh sebanyak (41,33%).
2. Tanggapan responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak (48,33%).

3. Tanggapan responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak (10,33%).

Dari hasil rekapitulasi diatas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dapat dinyatakan kurang berpengaruh dengan alasan bahwa dari hasil persentase jawaban responden masyarakat terhadap ke lima faktor diatas yaitu: faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal yang berjumlah sebanyak 48%.

5.5 Upaya-upaya Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Setelah penulis membahas tentang factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka selanjutnya penulis akan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

1. Upaya pemerintahan desa menggerakkan partisipasi melalui penerapan demokrasi di Kepenghuluan Tanjung Leban. Penerapan demokrasi disini yaitu mengenai kebijakan pemerintah desa dalam mengambil keputusan, artinya keputusan yang diambil oleh pemerintah desa berasal dari

alternative pemerintah itu sendiri maupun alternative dari masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban.

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis kepada Khoiruddin, S.Pdi (wawancara: Januari 2011) mengatakan : “upaya pemerintah desa dalam melakukan penerapan demokrasi sudah diterapkan dengan cara mengadakan rapat oleh kepala desa setiap satu bulan sekali”. Akan tetapi dari hasil pengamatan penulis, bahwa pemerintah desa pengambil keputusan sudah merujuk pada partisipasi melalui penerapan demokrasi, tetapi masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban yang kurang aktif memberikan ide-ide dan pemikirannya untuk kemajuan di Kepenghuluan Tanjung Leban, semua keputusan di beri kepercayaan kepada kepala desa.

2. Pemerintah desa Kepenghuluan Tanjung Leban melakukan upaya organisasi yang sudah dikenal

Sejauh pengamatan penulis partisipasi masyarakat ditunjukan dengan keaktifan pemuda Kepenghuluan Tanjung Leban dalam bidang olahraga, kegiatan olahraga, ini merupakan salah satu upaya pemerintah desa mengajak masyarakat untuk ikut menyumbangkan bakat dalam berbagai bidang olah raga.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pemuda desa Kepenghuluan Tanjung Leban Mu'ad, (wawancara: januari 2011) mengatakan bahwa dengan ditingkatkan sarana dan prasarana kegiatan ini maka masyarakat akan memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti

lomba-lomba olahraga pada tingkat kecamatan yang di adakan setiap bulan agustus nanti.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa olahraga merupakan factor penunjang pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban.

3. Upaya pemerintah desa menggerakkan partisipasi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban

Majunya suatu daerah dipengaruhi oleh pemerataan perekonomian masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban itu sendiri, dari pengamatan penulis masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani sawit dan nelayan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Kepenghuluan Tanjung Leban (wawancara: Januari 2011) mengatakan bahwa sebagai petani sawit memang penghasilannya satu bulan dua kali, namun masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban masih dalam tahap pembukaan lahan sehingga penghasilan tersebut minim dalam mendorong berjalannya proses pembangunan desa, mereka lebih disibukkan dengan kebutuhan sehari-hari. Dan upaya kami selaku pemerintahan desa ingin membantu masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban dalam perekonomian masyarakat berbentuk peralatan-peralatan pertanian sawit seperti, bibit sawit, pupuk sawit.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pembangunan secara alamiah harus muncul dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Sementara pihak pemerintah berperan sebagai pelancar dan pengendali pembangunan mekanisme demikian perlu dipahami bersama oleh segenap komponen pembangunan.

Bentuk partisipasi masyarakat ditampilkan dari berbagai kesediaan daya dan upaya masyarakat baik dari segi waktu, tenaga, pikiran, uang, dan benda. Sehingga menampilkan hasil berdaya guna dan berhasil guna. Dari hasil pembahasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat sangat rendah, hal ini dapat dilihat jawaban responden pada tabel Rekapitulasi 5.10 halaman 63 membuktikan 42 atau (42%) orang yang menyatakan tidak pernah berpartisipasi dalam bentuk uang ataupun barang. Dan juga masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban tidak pernah berpartisipasi dalam bentuk Inmaterial ini terlihat pada tabel rekapitulasi 5.10 berjumlah 39,66 atau (39,66%).

Masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir merasa lebih baik membuka lahan dan mencari uang untuk kehidupan sehari-hari dari pada ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Mereka beranggapan bahwa pembangunan sudah dianggarkan dan direncanakan oleh pemerintah daerah dan juga menjadi tanggung jawab daerah untuk membangun daerahnya sendiri. Bahkan masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban merasa

dimanjakan oleh pembangunan yang sudah berlangsung oleh pemerintahan daerah. Padahal mereka tidak menyadari bahwa pembangunan desa adalah tanggung jawab bersama baik dari masyarakat maupun dikalangan pemerintahan.

Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ada beberapa hal yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban dari 1433 populasi responden, didapat sampel 100 orang responden dengan tingkat kesalahan 10%. Di Desa Kepenghuluan Tanjung Leban faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kurang berpengaruh, ini dilihat dari jawaban responden pada tabel rekapitulasi 5.31 yang menyatakan berpengaruh berjumlah 41,33 orang atau (41,33%), kemudian yang menyatakan kurang berpengaruh 48,33 orang atau (48,33%), sedangkan responden yang menyatakan tidak berpengaruh 10,33 orang atau (10,33%). Dari ke lima Faktor tersebut yang dominan berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban yaitu faktor pekerjaan dan penghasilan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui 3 tahapan yaitu:

1. Upaya pemerintahan desa menggerakan partisipasi melalui penerapan demokrasi di Kepenghuluan Tanjung Leban.

2. Upaya organisasi yang dikenal diterapkan Kepenghuluan Tanjung Leban, seperti organisasi pemuda.
3. Upaya pemerintahan desa Kepenghuluan Tanjung Leban dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang perlu penulis kemukakan sesuai dengan hasil penelitian ini untuk masyarakat Desa Kepenghuluan Tanjung Leban sebagai berikut:

1. Segala faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa yang bersifat positif hendaknya perlu dipertahankan jangan dibiarkan sampai merosot.
2. Orang yang dalam keadaan miskin dan kebodohan sulit untuk terlepas dari berbagai tekanan hidup. Maka pihak pemerintah Desa hendaknya memperhatikan pentingnya pembangunan berbasis kerakyatan. Dalam artian pemerintahan harus dapat membantu perekonomian masyarakat kecil dan memberikan kemudahan untuk melangsungkan dan meneruskan pendidikan.
3. Adapun saran terakhir yang penulis berikan kepada pihak pemerintahan desa Kepenghuluan Tanjung Leban yaitu pemerintahan Kepenghuluan Tanjung Leban harus merekap dokumen tentang kegiatan desa, absen rapat, dan hasil pembangunan supaya pihak yang terkait dalam penelitian dapat meminta data yang lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Mariani, 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta; Gramedia.
- Conyers, Diana, 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Holil, Soelaiman, 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung.
- Hamin, Sufian, 2003. *Sistem Perencanaan Strategis dalam Pembangunan*. Pekanbaru: UIR PREES.
- Isbandi, Rukminto Adi, 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Mikkelsen, Britha, 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ndaraha, Taliziduhu, 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ruslan, Rasady, 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slamet, 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta*. Surakarta. Sebelas Maret University Press.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta, Rajawali.
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi Negara*, CV. Alfabeta: Bandung.
- _____, 2001. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syani, Abdul, 2002. *Sosiologi Sistemika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Veithzal, Rivai, 2004. *Kepemimpinan*. Jakarta: Grafindo Persada.

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa

PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 08 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kawasan Desa atau Kepenghuluan.

<http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat>.